



LAPORAN

**MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA AKSI (RENAKSI)
TRIWULAN II
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI MALUKU**

KATA PENGANTAR

Laporan Monev (Monitoring dan Evaluasi) Pelaksanaan Rencana Aksi adalah dokumen krusial yang menyajikan realisasi capaian kinerja, anggaran, kendala, serta tindak lanjut dari program/kegiatan yang berjalan dalam kurun waktu tertentu. Laporan Triwulan II ini bertujuan memastikan kesesuaian antara target dan pelaksanaan, meningkatkan akuntabilitas, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan kinerja selanjutnya.

Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Rencana Aksi Kelautan dan Perikanan Triwulan II oleh Dinas Kelautan dan Perikanan **untuk** memantau capaian dan merumuskan langkah perbaikan, termasuk evaluasi kendala dan rekomendasi tindak lanjut.

Demikian Laporan ini dibuat atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ambon, 02 April 2025
Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan



Erawan Asikin
Pembina Utama Muda
NIP. 196905031995031003.

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Rencana Aksi adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Aksi ini memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk perencanaan terkecil pada unit organisasi Pemerintah Daerah. Rencana Aksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Triwulan II Tahun Anggaran 2025 merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dan pembangunan daerah pada umumnya. Hasil dan rencana aksi dituangkan kedalam laporan hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi sebagai bentuk akuntabilitas perangkat daerah menjalankan rencana aksi yang telah ada.

Rencana Aksi dan Laporan Monev Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat sehingga kualitas penyusunan Rencana Aksi dan Laporan Monev Pelaksanaan Rencana Aksi akan menentukan kualitas pelayanan pada masyarakat dalam kaitan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Proses penyusunannya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Aksi dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi dan ditindaklanjuti dengan monitoring evaluasi di setiap triwulannya sehingga target yang direncanakan di akhir tahun telah terealisasi.

Menganalisa gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku di tahun selanjutnya sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja, dan Renstra PD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD

1.2. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 **tentang** Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- 2) Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi (Monev) Rencana Aksi Kinerja **yang** disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) pada masing-masing instansi (mengacu pada pedoman teknis SAKIP);
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Maluku.

1.3. Maksud dan Tujuan

- 1) Mengukur capaian target (output/outcome) dibandingkan dengan indikator yang ditetapkan dalam perencanaan pada Triwulan II.
- 2) Mendeteksi dini masalah atau hambatan di lapangan pada Triwulan II.
- 3) Memberikan masukan strategis dan rekomendasi pada Triwulan II.
 - Memastikan penggunaan anggaran dan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan pada Triwulan II.
 - Menyesuaikan kegiatan dengan perubahan kondisi atau kebijakan baru pada Triwulan II.

BAB.II RENCANA AKSI

1.1. RENSTRA

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah harus membuat dokumen Perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tatanan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku menyusun Dokumen Perencanaan Lima Tahunan Rencana Strategis (RENSTRA) yang mengacu pada RPJMD dan memperhatikan tugas dan fungsi.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan formal yang disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun Sasaran dari Rencana Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang diampu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku adalah :

1. Meningkatkan Pendapatan Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan;
2. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Alam laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang efektif dan efisien;
3. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan KP yang kuat dan efektif

1.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara mendalam untuk mencapai Strategi Organisasi .

Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan yang akan digunakan untuk periode 2025-2029 sesuai Perubahan Terakhir RENSTRA (Temokratik).

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku seperti berikut :

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran
1.	Mewujudkan tatakelola SD Organisasi yang handal untuk mendukung Penyelenggaraan Pembangunan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja organisasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD
2.	Meningkatkan Pendapatan Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan Produksi Perikanan	PAD sektor Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran
		Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)
			Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)
			Angka Konsumsi Ikan (Kg / Kapita/Tahun)

3.	Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Efektif dan Efisien	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan PP.Kecil yang dikelola (Ha)
			Jumlah POKMASWAS yang berperan dalam Pengawasan
4.	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan KP yang kuat dan Efisien	Terwujudnya Penegakan Regulasi yang kuat dan efektif	Presentase Tingkat Pelayanan Publik (%)
			Tingkat Kepatuhan Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan terhadap Perundang-Undangan (%)

1.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja organisasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B
2.	Meningkatkan Produksi Perikanan	PAD sektor Kelautan dan Perikanan	3.000.000.000,-
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	511.435,90
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	236.000

	Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	103,36
		Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	101
		Angka Konsumsi Ikan (Kg / Kapita/Tahun)	40,4
3.	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan PP.Kecil yang dikelola (Ha)	2,053.582,18
		Jumlah POKMASWAS yang berperan dalam Pengawasan	-
4.	Terwujudnya Penegakan Regulasi yang kuat dan efektif	Presentase Tingkat Pelayanan Publik (%)	100
		Tingkat Kepatuhan Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan terhadap Perundang-Undangan (%)	90

1.4. RENCANA AKSI

Rencana Aksi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2025 merupakan Penjabaran lebih lanjut atas rencana Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang dituangkan secara berkala (per bulan/triwulan). Adapun Rencana Aksi Triwulan II Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		KET.
			TARGET	REALIASASI TW.II	
1.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja organisasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B	-	

Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kelautan dan Perikanan OPD Triwulan II belum ada karena harus dilakukan melalui evaluasi terhadap komponen-komponen manajemen kinerja yang terintegrasi. (Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Capaian kinerja).

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		KET.
			TARGET TW.II	REALIASASI TW.II	
2.	Meningkatkan Produksi Perikanan	PAD sektor Kelautan dan Perikanan	1.500.000.000,-	1.250.000.000,-	
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	250.000	253.000	
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	80.00	77,23	

- a. Target PAD sektor Kelautan dan Perikanan pada Triwulan II dengan Target sebesar Rp. 1.500.000.000 dengan Realisasi Rp.1.250.000.000,- atau 83,3%
- b. Target Jumlah Produksi Perikanan Tangkap pada Triwulan II berjumlah 250.000 dengan Realisasi pada Triwulan II sebesar 253.000 Ton atau 101,20%
- c. Target Jumlah Produksi Perikanan Budidaya pada Triwulan II berjumlah 80.000 dengan Realisasi pada Triwulan II sebesar 77,23 Ton atau 96,54%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		KET.
			TARGET TW.II	REALIASASI TW.II	
3.	Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	50.15	50.25	
		Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	50.15	50.25	
		Angka Konsumsi Ikan (Kg / Kapita/Tahun)	20.00	20.15	

- a. Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada Triwulan II dengan Target 50.15 poin dengan Realisasi pada Triwulan II sebesar 50.25 poin;
- b. Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) pada Triwulan II dengan Target 50.15 poin dengan Realisasi pada Triwulan II sebesar 50.25 poin;
- c. Angka Konsumsi Ikan pada Triwulan II dengan Target 20.00 kg/kapita/tahun dengan Realisasi pada Triwulan II sebesar 20.15 kg/kapita/tahun;

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		KET.
			TARGET TW.II	REALIASASI TW.II	
4.	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan PP.Kecil yang dikelola (Ha)	-	-	

Menghitung jumlah kawasan konservasi dilakukan dengan menjumlahkan total unit kawasan yang telah ditetapkan secara legal oleh pemerintah, baik di darat (terrestrial) maupun di perairan (laut/pesisir). Data ini biasanya dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) setelah ada Usulan dari Pemerintah Provinsi masih dalam Tahap Inisiasi.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		KET.
			TARGET TW.II	REALIASASI TW.II	
5.	Terwujudnya Penegakan Regulasi yang kuat dan efektif	Presentase Tingkat Pelayanan Publik (%)	-	-	
		Tingkat Kepatuhan Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan terhadap Perundang-Undangan (%)	40	45	

- a. Presentase Tingkat Pelayanan Publik (%) dilakukan melalui survei kepuasan yang didasarkan pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Dinas kepada masyarakat;
- b. Target Tingkat Kepatuhan Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan terhadap Perundang-Undangan pada Triwulan II sebesar 40% dengan Realisasinya 45%.

BAB. III. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI

3.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi

Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Aksi Trwiulan II Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025, sebagai realisasi akan pelaksanaan kinerja terhadap sasaran strategis, program, kegiatan dan subkegiatan yang diampu oleh masing-masing Pejabat Struktural , Fungsional dan Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, yang dapat dilihat pada Tabel :

Rehabilitasi/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	Unit	0	Unit	4	Unit	1.519.278.890	0	1.788.000	370.614.603	372.402.603	25%	372.402.603	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Rehabilitasi/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	Unit	1	Unit	1	Unit	1.411.378.890	0	332.310.603	332.310.603	24%	332.310.603	Dinas - Grup Pulau III	
Rehabilitasi/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	Unit	0	Unit	0	Unit	3.000.000	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Program Pengelolaan Kelautan, Perair dan Pulau-Pulau Kecil	Luas Kawasan Konservasi Perairan Perair dan PP Kecil yang dikelola (Ha)	100%	30%	2.263.055 Ha	483.548.000	0	23.749.909	0	27.500.040	0	51.257.949	7%	42.908.040	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan Ruang Laut Sampal dengan 12 MI di Luar Nelayan dan Gas Bumi	Pengelolaan dan pemertan wilayah perairan dan pulau-pulau kecil sesuai terdapat dengan baik sesuai dengan peruntukannya	100%	50%	100%	346.677.100	0	5.230.000	0	25.556.040	0	30.786.040	9%	30.786.040	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Perencanaan dan Pemertan Puncak	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil yang Terlewat	Ha	Ha	Ha	142.827.500	0	2.280.000	3.780.000	6.060.000	4%	6.060.000	4%	6.060.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Perencanaan dan Pemertan Puncak	Ha	Ha	4	Ha	18.497.500	0	0	0	0	0%	0	0%	0	Dinas - Grup Pulau III
Mitigasi Bencana Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Perair dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	Orang	Orang	3.850.000	2.950.000	0	0	2.950.000	77%	2.950.000	77%	2.950.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengintegrasian Materi Teknik Perairan Perair/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Dokumen Materi Teknik Perairan Perair/RZWP-3-K yang terintegrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Dokumen	Dokumen	1	Dokumen	199.999.600	0	0	21.778.040	11%	21.778.040	11%	21.778.040	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Membenahi Masyarakat Perair dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya jumlah masyarakat perair dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan	100%	30%	1	336.870.900	0	18.519.909	0	1.950.000	0	20.469.909	6%	20.469.909	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Perair dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Perair dan Pulau-Pulau kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	Orang	Orang	80.980.900	0	0	0	0	0%	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Perair dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Perair dan Pulau-Pulau kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	100	Orang	Orang	49.938.900	0	0	0	0	0%	0	0%	0	Dinas - Grup Pulau III
Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Perair dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Perair dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok	Kelompok	Kelompok	18.950.000	0	0	0	0	0%	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Polikab Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Perair dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Perair dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	Orang	Orang	33.040.000	0	0	0	0	0%	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Bermbantu Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	Kelompok	Kelompok	203.900.000	18.519.909	1.950.000	0	20.469.909	10%	20.469.909	10%	20.469.909	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Bermbantu Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	Kelompok	15	200.000.000	0	18.519.909	0	0	9%	18.519.909	9%	18.519.909	Dinas - Grup Pulau III
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	100%	30%	11.054.721.000	22.130.000	0	1.348.488.114	0	1.370.618.114	12%	1.370.618.114	12%	1.370.618.114	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Nilai Tukar Nelayan / NTN (Poin)														DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampal dengan 12 MI	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap di Maluku	100%	30%	100%	10.783.287.200	0	7.260.000	1.325.178.114	1.322.438.114	12%	1.322.438.114	12%	1.322.438.114	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampal dengan 12 MI	Dokumen	Dokumen	Dokumen	146.770.000	0	7.260.000	12.170.000	19.430.000	12%	19.430.000	12%	19.430.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampal dengan 12 MI	Dokumen	Dokumen	1	204.000.000	0	5.250.000	5.250.000	5.250.000	2%	5.250.000	2%	5.250.000	Dinas - Grup Pulau III
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampal dengan 12 MI	Unit	Unit	Unit	104.165.120.000	0	1.313.008.114	1.313.008.114	1.313.008.114	12%	1.313.008.114	12%	1.313.008.114	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penelitian Iden Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Meningkatnya Pelayanan Rekomendasi Iden Usaha Perikanan	100%	30%	1	39.700.000	0	5.230.000	5.230.000	5.230.000	13%	5.230.000	13%	5.230.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Rekomendasi Perairan Berusaha Salubur Perencanaan dan Penguatan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 MI	Jumlah Perairan Berusaha Salubur Perencanaan dan Penguatan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 MI	Rekomendasi	Rekomendasi	Rekomendasi	5.600.000	0	2.950.000	2.950.000	2.950.000	52%	2.950.000	52%	2.950.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal perangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 MI	Jumlah data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal perangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 MI	Dokumen	Dokumen	3	34.050.000	0	2.280.000	2.280.000	2.280.000	7%	2.280.000	7%	2.280.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penetapan Lokasi Pembuangan serta Pengelolaan Palabuhan Perikanan Provinsi	Terselenggaranya pelayanan dan operasional kupalabuhan perikanan	100%	30%	1	202.423.800	0	4.140.000	16.560.000	20.700.000	10%	20.700.000	10%	20.700.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Sarana dan Prasarana Palabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Palabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	Unit	Unit	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Penguasaan Palabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Penguasaan Palabuhan Perikanan yang Terselenggara	Layanan	Layanan	2	202.423.800	4.140.000	16.560.000	20.700.000	20.700.000	10%	20.700.000	10%	20.700.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terselenggaranya Pelayanan Pendaftaran Kapal Perikanan	100%	30%	1	21.780.000	0	5.500.000	6.750.000	12.250.000	56%	12.250.000	56%	12.250.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penetapan Peryaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Peryaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Dokumen	Dokumen	0	10.750.000	0	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6%	6.750.000	6%	6.750.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penelitian surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	1	Rekomendasi	Rekomendasi	11.000.000	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000	50%	5.500.000	50%	5.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Gerakan Air Lainnya yang Dapat Disusutkan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselenggaranya Pelayanan Pendaftaran Kapal Perikanan	100%	30%	1	7.540.000	0	0	0	0	0%	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penetapan Peryaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Peryaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Dokumen	Dokumen	0	7.540.000	0	0	0	0	0%	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)				1.948.022.000	0	52.029.760	86.148.000	138.197.760	7%	138.197.760	7%	138.197.760	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Nilai Tukar Pembudidaya / NTPN (Poin)														DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Meningkatnya Pelayanan Perairan Bidang Pembudidayaan Ikan		100%	30%	1	270.450.000	0	34.219.760	6.240.000	40.459.760	15%	40.459.760	15%	40.459.760	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penetapan Peryaratan dan Prosedur Penetapan Iden Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perairan dan Prosedur Penetapan Iden Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Ditetapkan	Rekomendasi	Rekomendasi	Rekomendasi	203.850.000	28.639.760	900.000	29.539.760	29.539.760	14%	29.539.760	14%	29.539.760	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penetapan Peryaratan dan Prosedur Penetapan Iden Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Dokumen	Dokumen	6	68.800.000	0	5.340.000	10.920.000	10.920.000	16%	10.920.000	16%	10.920.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Dokumen	Dokumen	1	10.800.000	0	900.000	3.600.000	4.500.000	42%	4.500.000	42%	4.500.000	Dinas - Grup Pulau III
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100%	30%	1	1.677.372.000	0	79.928.000	0	97.738.000	6%	97.738.000	6%	97.738.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1	15.810.000	0	3.780.000	3.780.000	3.780.000	24%	3.780.000	24%	3.780.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	Unit	Unit	1.160.125.000	0	0	0	0	0%	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pemertan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	Unit	2	400.807.000	14.550.000	64.578.000	79.128.000	79.128.000	20%	79.128.000	20%	79.128.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Terjadi Sehat	Dokumen	Dokumen	1	34.090.000	0	9.150.000	9.150.000	9.150.000	27%	9.150.000	27%	9.150.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pemertan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dilakuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Orang	Orang	40	64.540.000	0	3.240.000	3.420.000	5.680.000	9%	5.680.000	9%	5.680.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Penguasaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tingkat Kesehatan Pulau, Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Perundang-undangan (%)	90	711.466.000	0	24.439.393	68.259.000	92.698.393	92.698.393	13%	92.698.393	13%	92.698.393	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 MI	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap, Budidaya, dan Ruang Laut	100%	30%	1	628.445.000	0	24.439.393	63.699.000	88.138.393	14%	88.138.393	14%	88.138.393	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 MI	Jumlah Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 MI	Dokumen	Dokumen	Dokumen	1.800.000	0	0	0	0	0%	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengawasan Usaha perikanan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 MI sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Usaha perikanan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 MI sesuai kewenangan provinsi	Dokumen	Dokumen	Dokumen	162.800.000	4.680.000	30.869.000	35.549.000	35.549.000	22%	35.549.000	22%	35.549.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengawasan Usaha perikanan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 MI sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Usaha perikanan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 MI sesuai kewenangan provinsi	Dokumen	Dokumen	1	48.300.000	900.000	3.600.000	4.500.000	4.500.000	9%	4.500.000	9%	4.500.000	Dinas - Grup Pulau III
Pengawasan usaha pemertan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah usaha pemertan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Dokumen	Dokumen	Dokumen	278.323.000	19.199.393	11.990.000	31.109.393	31.109.393	11%	31.109.393	11%	31.109.393	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengawasan usaha pemertan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah usaha pemertan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Dokumen	Dokumen	1	141.068.000	19.199.393	19.199.393	19.199.393	19.199.393	14%	19.199.393	14%	19.199.393	Dinas - Grup Pulau III
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (PKMAMASWAS) yang Terlewat dan AKIF	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (PKMAMASWAS) yang Terlewat dan AKIF	Kelompok	Kelompok	Kelompok	185.492.000	600.000	20.880.000	21.480.000	21.480.000	12%	21.480.000	12%	21.480.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (PKMAMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (PKMAMASWAS)	Kelompok	Kelompok	12	68.612.000	0	11.630.000	11.630.000	11.630.000	17%	11.630.000	17%	11.630.000	Dinas - Grup Pulau III
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Gerakan Air Lainnya yang Dapat Disusutkan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan	100%	30%	1	83.015.000	0	4.560.000	0	4.560.000	5%	4.560.000	5%	4.560.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.2. Permasalahan dan Tindak Lanjut

a. Permasalahan

Untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya perikanan yakni Meningkatkan Pendapatan Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan, Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Alam laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang efektif dan efisien serta Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan KP yang kuat dan efektif maka tidak ada Permasalahan yang mempengaruhi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

b. Tindak Lanjut

Semua Pelaksanaan Program dan Kegiatan sudah sesuai RENSTRA, Sasaran strategis dan IKU dalam Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan

BAB. IV. PENUTUP

Dari hasil kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Aksi Kelautan dan Perikanan mencakup peningkatan kesejahteraan nelayan (Nilai Tukar Nelayan/NTN), Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi), Luasan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Terkelola, Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Perundang-Undangan, Pendapatan Asli Daerah Sektor Kelautan dan Perikanan, Produksi Perikanan Tangkap, Produksi Perikanan Budidaya dan Angka Konsumsi Ikan semuanya memenuhi target pada Triwulan II dan ada yang yang belum mencapai Target karena perhitungan dinilai pada masa Triwulan terakhir.